

PROFIL
TENAGA KERJA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

AGUSTUS 2011



BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Kalimantan Selatan

<http://kalsel.bps.go.id>

PROFIL

**TENAGA KERJA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

AGUSTUS 2011

<http://kalselbps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Kalimantan Selatan**

PROFIL TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN AGUSTUS 2011

No. Katalog : 2303003.63
No. ISBN : 979-478-911-9
No. Publikasi : 63520.11.03

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : vii + 48 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kehendak dan bimbinganNya publikasi Profil Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2011 dapat diterbitkan. Publikasi ini menyajikan aspek ketenagakerjaan untuk penduduk berumur 15 tahun keatas yang bersumber pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011. Indikator yang disajikan antara lain penduduk usia kerja, daya serap angkatan kerja, penduduk usia kerja menurut kegiatannya, angka pengangguran dan lain sebagainya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga publikasi ini bermanfaat dan berguna bagi para pengguna data.

Banjarmasin, Juni 2012

Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala,

Iskandar Zulkarnain, SE, M.Si
NIP. 19550831 197602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI.....	6
2.1 Ketenagakerjaan.....	6
2.2 Konsep dan Definisi.....	7
BAB III. GAMBARAN UMUM.....	10
3.1 Kondisi Geografis.....	10
3.2 Penduduk.....	12
3.3 Perekonomian	15
3.4 Sosial Budaya	19
BAB IV. KETENAGAKERJAAN.....	21
4.1 Penduduk Usia Kerja.....	21
4.2 Penduduk Angkatan Kerja.....	24
4.3 Penduduk Bekerja.....	28
4.3.1 Jenis Kelamin.....	28

4.3.2. Tingkat Kesempatan Kerja	29
4.3.3. Tingkat Pendidikan.....	31
4.3.4. Jumlah Jam Kerja.....	33
4.3.5. Lapangan Usaha.....	36
4.3.6. Status Bekerja.....	40
4.4. Pengangguran.....	43

<http://kalsel.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011.....	12
Tabel 3.2.	Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2011	13
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000, 2010 dan 2011	15
Tabel 3.4.	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 – 2011.....	16
Tabel 3.5.	Peranan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 – 2011.....	18
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2011.....	23
Tabel 4.2.	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Agustus 2011.....	24
Tabel 4.3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2010-2011.....	26
Tabel 4.4.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2010 - Agustus 2011.....	29
Tabel 4.5.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2010-2011.....	30
Tabel 4.6.	Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2011	32
Tabel 4.7.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Agustus 2011	34
Tabel 4.8.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Agustus 2011.....	36

Tabel 4.9. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Sektor Agustus 2011	37
Tabel 4.10. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Sektor Agustus 2011.....	39
Tabel 4.11. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Agustus 2011	41
Tabel 4.12. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal / Informal dan Jenis Kelamin Agustus 2011	42
Tabel 4.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Agustus 2011	44
Tabel 4.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2011	46
Tabel 4.15. Persentase Jumlah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2011.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Alur Ketenagakerjaan	7
Gambar 2.2	Diagram Alur Status Pekerjaan	9
Gambar 4.1.	Persentase Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota Agustus 2011	22
Gambar 4.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Agustus 2011	28
Gambar 4.3.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Agustus 2011	40
Gambar 4.4.	Persentase Pengangguran Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Agustus 2011	45

1.1. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penggerak roda pembangunan di seluruh tingkat wilayah. Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi untuk aktifitas kegiatan ekonomi.



Namun permasalahan kuantitas angkatan kerja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini berguna untuk mengantisipasi peningkatan jumlah tenaga kerja seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja.

Kesiapan para tenaga kerja khususnya para pencari kerja baru dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan persaingan di pasar tenaga kerja. Rendahnya daya saing pekerja akan berakibat rendahnya tingkat

penyerapan tenaga kerja. Tidak terserapnya angkatan kerja ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Peningkatan angka pengangguran memiliki efek domino bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Imbas dari hal tersebut seperti meningkatnya masalah sosial di masyarakat antara lain keributan antar etnis atau wilayah, pencurian, dan berbagai tindak kejahatan/kriminal lainnya. Hal ini akan memukul balik hasil pencapaian pembangunan sebelumnya.

Salah satu cara untuk melihat pasar kerja di Kalimantan Selatan melalui tingkat kesempatan kerja (TKK). Indikator ini menunjukkan kemudahan angkatan kerja untuk berpartisipasi secara ekonomi di seluruh sektor. Kemudahan berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian merefleksikan kemudahan masyarakat mencari kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sekaligus berpartisipasi untuk mendapatkan imbalan berupa balas jasa atas faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Program pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang akan memberikan tingkat penghidupan yang layak bagi setiap warga negara.

Upaya pemulihan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, keserasian pertumbuhan antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan memerlukan fundamental ekonomi yang kokoh. Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan trend semakin membaik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perekonomian Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut dari sudut pandang ketenagakerjaan mengindikasikan dua hal, yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang

semakin luas. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa proses produksi berjalan semakin efisien dan efektif. Sedangkan penyediaan kesempatan kerja yang semakin luas akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan output kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Untuk mengatasi masalah pengangguran perlu disusun suatu strategi/perencanaan yang terpola dan terpadu di bidang ketenagakerjaan. Hal ini menuntut tersedianya data dan informasi yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan. BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya berusaha memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan. Mulai pelaksanaan Sakernas Agustus 2007 BPS telah menambah ukuran sampel hingga gambaran ketenagakerjaan dapat disajikan untuk estimasi level Kabupaten/Kota.

Sakernas dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi dan menyediakan data dasar ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Melalui Sakernas berbagai informasi dan perkembangan ketenagakerjaan mampu lebih cepat terpantau, peka dan representatif. Diharapkan output Sakernas akan menjadi input yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijaksanaan dalam usaha mencapai kesejahteraan. Hasil Sakernas juga dapat dimanfaatkan oleh wirausaha sebagai salah satu masukan strategi persiapan usaha atau sebagai perencanaan pengembangan usaha.

Informasi yang diperoleh dari hasil Sakernas adalah jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran, tingkat penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, dan status pekerjaan dari penduduk yang bekerja. Bersumber dari data dasar tersebut dapat dilakukan penghitungan beberapa indikator penting ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Publikasi ini menampilkan indikator-indikator umum ketenagakerjaan kondisi Agustus 2011. Beberapa istilah ketenagakerjaan yang digunakan juga ditampilkan guna membantu para pengguna data dalam menginterpretasikan dan melakukan analisa terhadap indikator yang disajikan.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Profil Ketenagakerjaan ini adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa informasi ketenagakerjaan juga disajikan untuk memberikan gambaran umum keadaan ketenagakerjaan menurut kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penerbitan publikasi ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data dasar ketenagakerjaan bagi seluruh pengguna data baik pihak pemerintah dan swasta.

Tujuan yang ingin dicapai pada penyajian publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan lebih rinci menurut aspek jenis kelamin, pendidikan, lapangan usaha dan status pekerjaan.

2. Penyediaan indikator utama di bidang ketenagakerjaan.
3. Menjadi informasi awal bagi pihak pemerintah dan swasta dalam menyusun kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan.

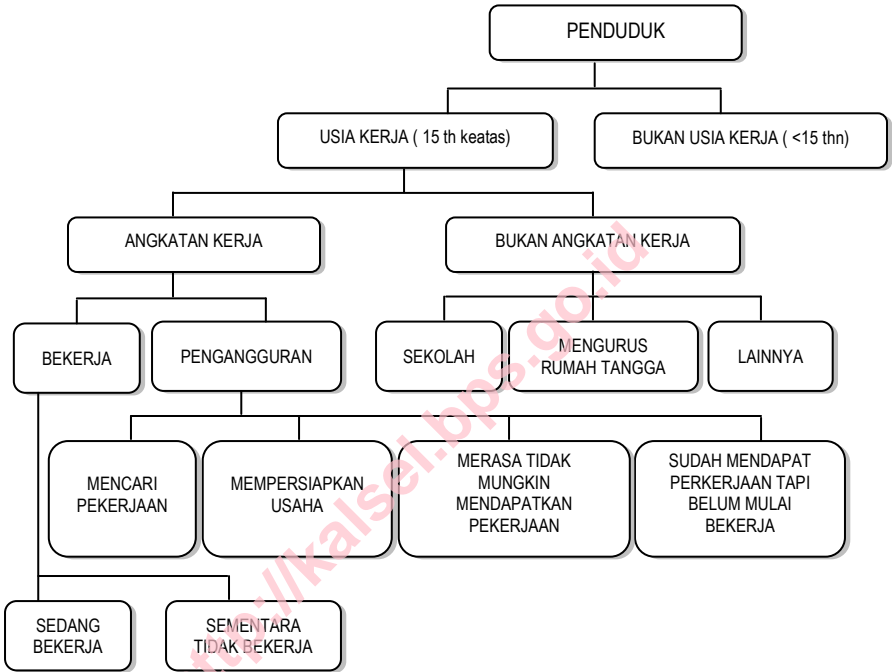
<http://kalsel.bps.go.id>

2.1. Ketenagakerjaan

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam pengumpulan data Sakernas adalah konsep dasar angkatan kerja (*Standard Labor Force Concepts*), (Gambar 2.1). Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan bukan penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja digolongkan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga, lainnya). Pengukurannya didasarkan pada periode hunjukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode hunjukan (*time reference*) tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumatangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer, penerima pendapatan/bunga bank, jompo atau alasan lain).

Gambar 2.1.
Diagram Alur Ketenagakerjaan



2.2. Konsep dan Definisi

Penduduk Usia Kerja

Penduduk berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja

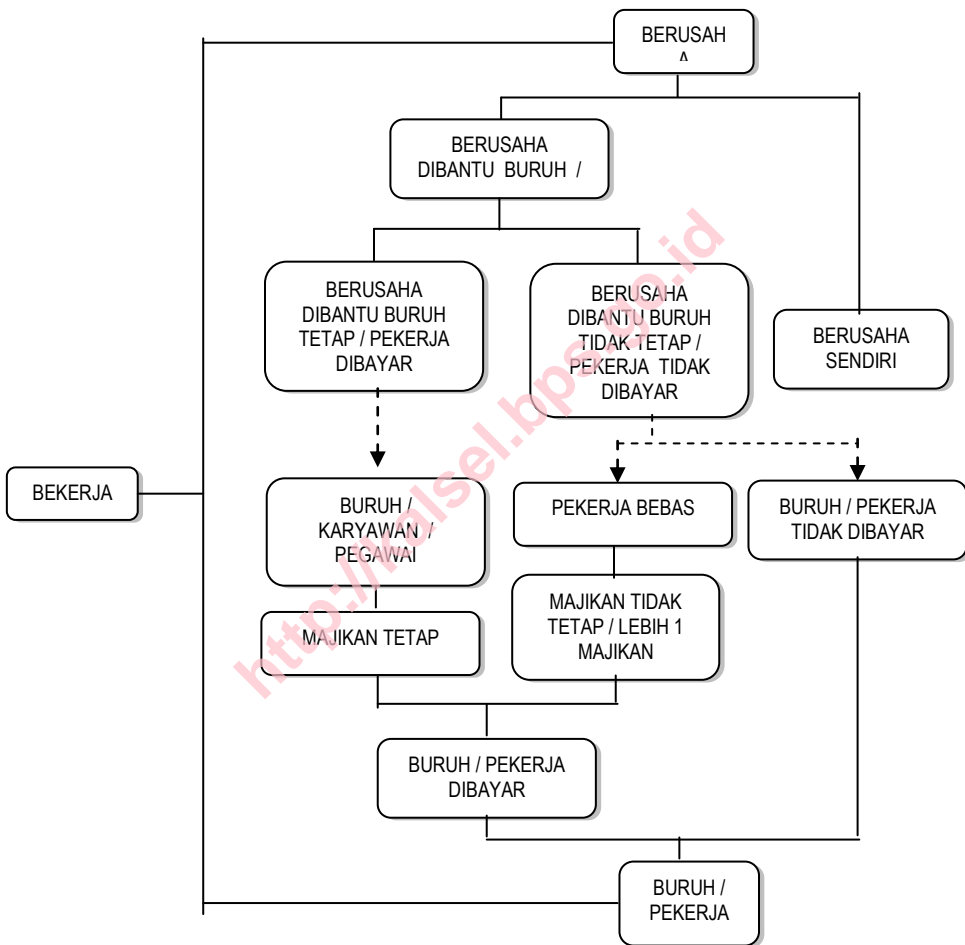
Penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu..

Pengangguran	Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (<i>discouraged workers</i>), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (<i>future starts</i>).
Mencari Pekerjaan	Kegiatan seseorang yang tidak bekerja pada periode survei dan sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
Lapangan Pekerjaan / Sektor	Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada <i>the International Standard of Industrial Classification (ISIC)</i> .
Jenis Pekerjaan	Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang. Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jenis Jabatan Indonesia (KBJI) 2002 yang mengacu pada <i>The International Standard Classification of Occupation (ISCO)</i>
Status Pekerjaan	Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, yang terdiri dari: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar, buruh / karyawan / pegawai, pekerja bebas dan pekerja tak dibayar (Gambar 2.2).
Jumlah Jam Kerja	Lama waktu digunakan untuk bekerja selama hari kerja dalam seminggu, termasuk jam kerja lembur.

Gambar 2.2
Diagram Alur Status Pekerjaan



Luas daratan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi 2 wilayah peruntukan yaitu ruang kawasan lindung sebesar 20,81 persen dan ruang kawasan budidaya sebesar 79,19 persen dari luas wilayah daratan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki batas wilayah:

- Sebelah barat : Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah timur : Selat Makasar
- Sebelah selatan : Laut Jawa
- Sebelah utara : Provinsi Kalimantan Timur.

Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 dengan ibukota Provinsi adalah Banjarmasin. Saat ini wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota. Kabupaten termuda adalah kabupaten Tanah Bumbu sebagai pemekaran wilayah administrasi kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Balangan yang merupakan pemekaran wilayah administrasi kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Kotabaru adalah kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sebesar 25,11 persen. Kabupaten/Kota dengan wilayah administrasi terkecil adalah kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan luas wilayah hanya sebesar 0,19 persen dan 0,88 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan banyak dialiri sungai yang umumnya berpangkal dari Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. Sungai-sungai yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini sebagian masih digunakan sebagai sarana

transportasi utama dan transportasi alternatif yang digunakan sebagai sarana perekonomian Kalimantan Selatan.

Tabel 3.1.
Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Tanah Laut	3 729,30	9,94
Kotabaru	9 422,73	25,11
Banjar	4 710,97	12,55
Barito Kuala	2 376,22	6,33
Tapin	2.174,95	5,80
Hulu Sungai Selatan	1 804,94	4,81
Hulu Sungai Tengah	1 472,00	3,92
Hulu Sungai Utara	951,25	2,53
Tabalong	3 599,95	9,59
Tanah Bumbu	5 066,96	13,50
Balangan	1 819,75	4,85
Banjarmasin	72,67	0,19
Banjarbaru	328,83	0,88
Kalimantan Selatan	37 530,52	100,00

Sumber : BPS, Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2011

3.2. Penduduk

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data angka sementara pada tahun 2011 ditempati oleh sekitar 3,69 juta jiwa. Dirinci berdasarkan kabupaten/kota terlihat bahwa Kota Banjarmasin merupakan daerah yang

memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan daerah lain, yaitu sebesar 634.990 jiwa (17,18 persen) dari total seluruh penduduk Kalimantan Selatan.

Tabel 3.2.
Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin Tahun 2011 *)

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	156.014	147.416	303.430	81
Kotabaru	155.141	141.846	296.987	32
Banjari	262.271	254.392	516.663	110
Barito Kuala	139.605	139.073	278.678	117
Tapin	89.920	84.548	170.468	78
Hulu Sungai Selatan	106.378	107.369	213.747	118
Hulu Sungai Tengah	122.213	122.676	244.889	166
Hulu Sungai Utara	102.694	107.285	209.979	221
Tabalong	113.709	110.104	223.813	62
Tanah Bumbu	144.878	133.046	277.924	55
Balangan	57.290	56.719	114.009	63
Banjarmasin	317.449	317.541	634.990	8.738
Banjarmaru	107.353	102.194	209.547	637
Kalimantan Selatan	1.870.915	1.824.209	3.695.124	98

*) Angka sementara

Perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh bahwa secara rata-rata kepadatan penduduk

pada tahun 2011 mencapai 98 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi adalah kota Banjarmasin, yaitu untuk setiap 1 km² dihuni sekitar 8.738 jiwa. Kota Banjarbaru merupakan wilayah administrasi dengan kepadatan penduduk kedua terbesar, yaitu mencapai 637 orang km². Kabupaten Banjar yang merupakan kabupaten/kota yang jumlah penduduk kedua terbesar di Kalimantan Selatan hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 110 orang per km². Masih rendahnya kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar disebabkan Kabupaten Banjar merupakan wilayah administrasi terluas ketiga di Kalimantan Selatan. Kabupaten Kotabaru adalah Kabupaten dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu hanya 32 jiwa per km². Kabupaten lainnya yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 100 adalah Kabupaten Tanah Laut (81), Tapin (78), Tabalong (62), Tanah Bumbu (55) dan Kabupaten Balangan (63).

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting di bidang sosial ekonomi yang berhubungan dengan dinamika kependudukan. Selain berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi, pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia

Salah satu kegunaan indikator pertumbuhan penduduk ini adalah sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk di suatu wilayah di masa akan datang. Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk dapat disusun kebijakan di bidang kependudukan dan perencanaan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan. Sebagai contoh di bidang pendidikan, dapat diperkirakan jumlah penduduk usia sekolah. Hal ini

bermanfaat sebagai informasi awal untuk menyiapkan kebutuhan jumlah guru dan jumlah sekolah dalam kerangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000, 2010 dan 2011

Kabupaten/Kota	2000	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	231 742	296 333	303.430
Kotabaru	227 625	290 142	296.987
Banjar	412 913	506 839	516.663
Barito Kuala	246 705	276 147	278.678
Tapin	141 715	167 877	170.468
Hulu Sungai Selatan	195 473	212 485	213.747
Hulu Sungai Tengah	224 119	243 460	244.889
Hulu Sungai Utara	196 811	209 246	209.979
Tabalong	171 261	218 620	223.813
Tanah Bumbu	186 090	267 929	277.924
Balangan	96 102	112 430	114.009
Banjarmasin	529 095	625 481	634.990
Banjarbaru	124 375	199 627	209.547
Kalimantan Selatan	2 984 026	3 626 616	3.695.124

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010. *) Angka Sementara

3.3. Perekonomian

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Pencapaian kesejahteraan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis dituangkan dalam program kerja pemerintah,

seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan Kalimantan Selatan Sehat, mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Pencapaian pembangunan di sektor ekonomi digambarkan secara makro melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.4.
 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan
 Tahun 2009 – 2011

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	Pertumbuhan Ekonomi
	Nominal (Juta Rp)	Nominal (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	51.460.793,70	29.051.630,55	5,29
2010	59.821.156,82	30.674.123,86	5,58
2011	68.234.880,54	32.552.849,54	6,12

Sumber : PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 - 2011

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun tahun 2009-2011 mengalami peningkatan yang optimis. Pencapaian angka PDRB Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan kinerja di beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Jumlah nilai tambah kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010 sebesar 59,82 triliun rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 51,46 triliun rupiah.

Peningkatan ini terus berlanjut di tahun 2011. Pada tahun 2010 seluruh nilai tambah perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 68,23 triliun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan positif yang berfluktuatif. Tetapi fluktuasi pertumbuhan positif ekonomi ini masih berada dalam kisaran mengembirakan, yaitu antara 5-6 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008-2009 mencapai 5,29 persen. Pada kurun tahun 2009- 2010, mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,58 persen. Peningkatan yang menggambarkan gairah perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan diperlihatkan oleh angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 yang sebesar 6,12 persen. Pencapaian kinerja ekonomi yang mengembirakan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan serta disertai dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunan di masa datang. Hal ini menjadi salah satu penentu dalam rangka mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan atau pengangguran.

Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Tabel 3.5 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2011. Kontribusi terbesar dalam kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan pada tahun 2011 diberikan oleh kelompok sektor primer sebesar 44,52 persen. Kelompok sektor primer merupakan agregat dari sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Selama kurun waktu 2009-2011 kelompok sektor primer masih merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai tambah kegiatan ekonomi Provinsi

Kalimantan Selatan. Tetapi kontribusi kelompok sektor primer cenderung berkurang setiap tahunnya. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan mulai bergeser ke sektor tersier.

Tabel 3.5.
Peranan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 – 2011

Sektor	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	22,11	20,87	20,10
Pertambangan dan Penggalian	21,40	23,58	24,42
Industri Pengolahan	9,86	9,38	9,19
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,57	0,58	0,57
Bangunan	6,18	5,97	5,85
Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,96	14,97	15,36
Pengangkutan dan Komunikasi	9,21	8,89	8,78
Lembaga Keuangan	5,10	5,05	5,04
Jasa-jasa	10,60	10,70	10,69
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2011

Kontribusi kelompok sektor tersier yang terdiri atas sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan dan sektor Jasa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 sektor tersier hanya memberikan kontribusi sebesar 39,87 persen terhadap pembentukan nilai tambah kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan. Sektor ini mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 39,61 dan kembali meningkat sebesar 39,87 persen pada tahun 2011.

Kelompok sektor sekunder yang terdiri atas sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum dan sektor bangunan pada tahun 2011 memberikan sumbangan sebesar 15,61 persen terhadap nilai tambah kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan. Selama periode 2009-2011 kelompok sektor sekunder memperlihatkan kecenderungan penurunan kontribusi. Hal ini lebih disebabkan semakin berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian di Kalimantan Selatan. Sektor ini secara berkelanjutan terus mengalami penurunan dalam periode 3 tahun terakhir.

Mengingat potensi sumber pendapatan terbesar Kalimantan Selatan berasal dari kelompok sektor primer (pertanian dan pertambangan & penggalian) maka faktor sumber daya alam perlu dikelola dan dipelihara dengan tepat dan terarah. Diharapkan pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya.

3.4. Sosial Budaya

Penduduk asli Provinsi Kalimantan Selatan adalah suku bangsa Banjar yang intinya terdiri dari sub suku, yaitu Maayan, Lawangan dan Bukiat yang mengalami percampuran dengan suku bangsa Melayu, Jawa dan Bugis. Identitas utama yang terlihat adalah bahasa Banjar sebagai media komunikasi. Suku-suku Maayan, Lawangan, Bukit, dan Ngaju dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa, dipersatukan oleh kerajaan yang beragama Buddha, Hindu dan terakhir Islam, dari kerajaan Banjar, sehingga menumbuhkan suku bangsa Banjar yang berbahasa Banjar.

Masyarakat adat Kalimantan Selatan terutama suku Banjar mengenal berbagai upacara adat yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Misalnya adanya adat berpantang bagi wanita hamil, upacara Bapalas badan, dilaksanakan ketika bayi berumur 40 hari yang sekaligus memberikan nama; upacara perkawinan terdiri dari beberapa tahap, sejaka Babasasuluh, Badatang, Baantar Patalian dan puncak upacara adalah pengantin Batatai atau bersanding. Terakhir adalah upacara Pemakanan Pengantin yaitu kedua mempelai menjalani bulan madu, selama tujuh hari tujuh malam hanya makan dan minum di balik tabir tertutup.

Di bidang seni rupa, suku Banjar mengenal sulaman-sulaman yang indah sebagai pelengkap peralatan upacara seni ukir, terdapat pada ukiran kayu pada bangunan rumah atau mesjid, juga pada kerajinan barang-barang dari Kuningan seperti tempat sirih, peludahan, bokor, kapit, abun dan sebagainya. Anyaman dari pandan ataupun rotan umumnya di kerjakan oleh wanita untuk mengisi waktu senggang berkembang pula di daerah lain.

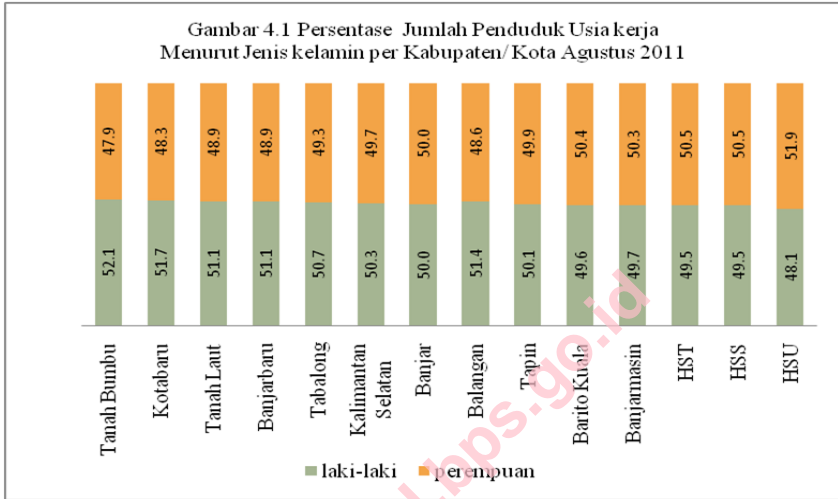
Seni bangunan terutama bangunan rumah, masyarakat suku Banjar sudah memiliki arsitektur yang cukup tinggi nilainya. Rumah-rumah tradisional berupa rumah panggung dengan atap yang menjulang tinggi. Dahulu rumah-rumah tersebut dibedakan dalam beberapa golongan atas, seperti bangsawan, ulama, pedagang mempunyai rumah bubungan tinggi yang disebut gajah baliku, palimasan palimbangan, gajah manyusu, rumah balai laki, dan rumah balai bini. Sedangkan bagi kebanyakan rumah adalah rumah cacak burung, rumah tadah alas, rumah gudang atau pondok biasa.

4.1. Penduduk Usia Kerja

Badan Pusat Statistik dalam melakukan penghitungan statistik ketenagakerjaan menggunakan konsep dan definisi yang direkomendasikan *International Labour Organization (ILO)*. ILO mengelompokan penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2011 diperoleh bahwa persentase penduduk laki-laki usia kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja di Kalimantan Selatan sebesar 50,3 persen. Kondisi ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk usia kerja perempuan yang sebesar 49,7 persen. Persentase penduduk usia kerja laki-laki tertinggi adalah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 52,1 persen. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kabupaten yang memiliki persentase penduduk usia kerja tertinggi didominasi penduduk perempuan, yaitu sebesar 51,9 persen. Kabupaten yang termasuk dalam Banua Enam, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga yang memiliki persentase penduduk usia kerja laki-laki di bawah persentase rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Usia kerja Menurut Jenis kelamin per Kabupaten/Kota Agustus 2011



Dibandingkan Agustus 2010 komposisi penduduk usia kerja menurut jenis kelamin mengalami sedikit perubahan. Pada Agustus 2010, penduduk usia kerja laki-laki di Kalimantan Selatan sebesar 50,11 persen dan persentase penduduk usia kerja perempuan adalah sebesar 49,89 persen terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kota Banjarmasin merupakan kabupaten/kota penyumbang penduduk usia kerja terbesar untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Sekitar 17,60 persen penduduk usia kerja di Kalimantan Selatan bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Kabupaten Banjar memiliki kontribusi terbesar ke dua, yaitu sebesar 14,03 persen. Kabupaten/Kota lainnya memberikan kontribusi di bawah 10 persen terhadap jumlah penduduk usia kerja di Kalimantan Selatan.

Tabel 4.1
 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
 dan Jenis Kelamin Agustus 2011

Kabupaten / Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	8,29	8,01	8,15
Kotabaru	7,93	7,48	7,70
Banjar	13,95	14,10	14,03
Barito Kuala	7,47	7,68	7,58
Tapin	4,76	4,79	4,78
Hulu Sungai Selatan	5,93	6,11	6,02
Hulu Sungai Tengah	6,69	6,88	6,78
Hulu Sungai Utara	5,43	5,92	5,67
Tabalong	6,06	5,96	6,01
Tanah Bumbu	7,42	6,91	7,17
Balangan	3,00	2,87	2,94
Banjarmasin	17,40	17,81	17,60
Banjarbaru	5,67	5,49	5,58
Kalimantan Selatan	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan kelompok umur memperlihatkan bahwa persentase terbesar penduduk usia kerja bekerja berada pada kelompok umur 30–49 tahun. Sekitar 43,00 persen penduduk usia kerja berada pada kelompok umur 30-49 tahun. Persentase terbesar penduduk usia kerja berada pada kelompok umur 30-49 tahun terjadi di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Tabel 4.2
 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
 dan Kelompok Umur Agustus 2011

Kabupaten / Kota	Kelompok Umur (tahun)			Jumlah
	15-29	30-49	50+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	37,84	44,59	17,57	100,00
Kota Baru	38,79	45,62	15,58	100,00
Banjar	40,31	41,18	18,51	100,00
Barito Kuala	38,40	45,28	16,32	100,00
Tapin	37,70	42,04	20,26	100,00
Hulu Sungai Selatan	34,53	43,46	22,02	100,00
Hulu Sungai Tengah	35,85	41,14	23,01	100,00
Hulu Sungai Utara	37,84	41,09	21,07	100,00
Tabalong	38,08	44,66	17,26	100,00
Tanah Bumbu	40,12	44,22	15,65	100,00
Balangan	38,55	42,97	18,48	100,00
Kota Banjarmasin	38,19	41,81	20,00	100,00
Kota Banjar Baru	39,90	43,55	16,54	100,00
Kalimantan Selatan	38,34	43,00	18,66	100,00

4.2. Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja dibedakan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Pengelompokan ini berdasarkan pada jenis kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk yang masuk dalam kelompok ini adalah

penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk dengan kegiatan utamanya adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti : pensiunan, penerima pendapatan/transfer, jompo atau alasan lain).

BPS dalam mengklasifikasikan seseorang berdasarkan kegiatan utama seminggu yang lalu menggunakan azas eksklusifitas. Dengan azas eksklusifitas maka seseorang hanya digolongkan dalam satu kategori saja. Penggunaan azas ini bertujuan untuk menghindari seseorang masuk dalam lebih dari satu kategori. Manfaat lainnya adalah dapat dilakukan keterbandingan data ketenagakerjaan antar periode. Azas eksklusifitas yang digunakan BPS dalam ketenagakerjaan meletakkan prioritas utama keterlibatan seseorang dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, seseorang yang sedang berkuliah sambil bekerja hanya digolongkan dalam satu kategori yaitu bekerja.

Penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada kondisi Agustus 2011 sekitar 73,3 persen adalah mereka yang termasuk dalam penduduk angkatan kerja. TPAK sebesar 73,3 persen menyiratkan bahwa sekitar 73 orang dari setiap 100 orang penduduk Kalimantan Selatan telah secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi atau mereka yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia kerja. Selebihnya sekitar 26,7 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 4.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2010-2011

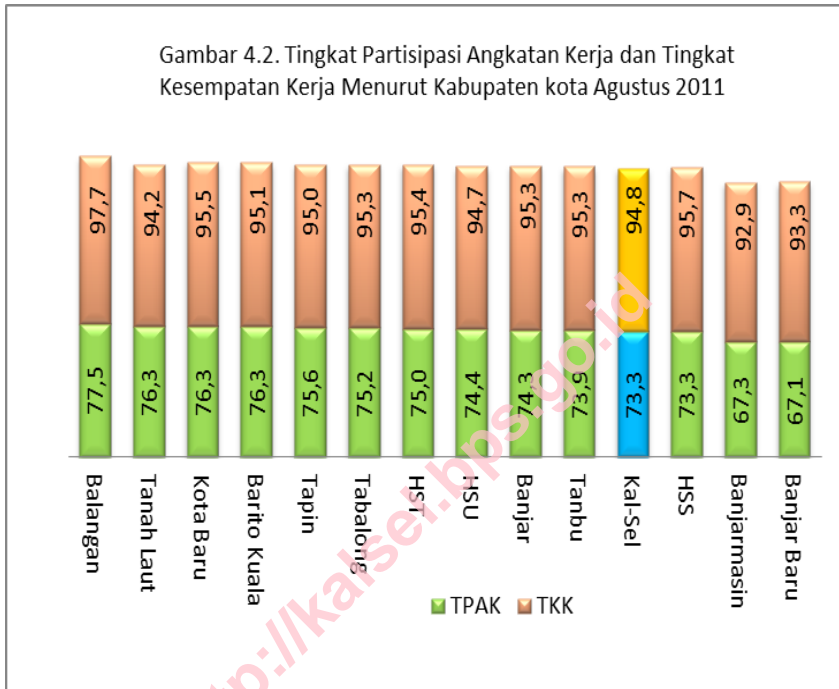
Kabupaten / Kota	Agustus 2010			Agustus 2011		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Laut	91,6	55,2	73,9	90,2	61,9	76,3
Kotabaru	87,8	43,0	66,4	90,8	60,8	76,3
Banjar	87,8	64,2	76,0	88,1	60,5	74,3
Barito Kuala	88,2	57,3	72,7	89,8	63,0	76,3
Tapin	87,0	55,3	71,1	89,7	61,5	75,6
HSS	85,6	61,1	73,2	87,6	59,2	73,3
HST	87,4	61,8	74,4	89,2	61,1	75,0
HSU	83,8	64,2	73,6	90,8	59,3	74,4
Tabalong	87,3	63,1	75,5	89,6	60,4	75,2
Tanah Bumbu	89,5	45,0	68,2	88,4	58,2	73,9
Balangan	86,2	67,8	77,0	89,7	64,7	77,5
Banjarmasin	82,5	50,0	66,0	83,6	51,2	67,3
Banjarbaru	82,3	47,4	65,2	82,8	50,6	67,1
Kalimantan Selatan	86,6	55,8	71,3	87,9	58,5	73,3

Menurut jenis kelamin terdapat perbedaan cukup nyata antara TPAK penduduk laki-laki dan perempuan. Pada kondisi Agustus 2011 TPAK penduduk laki-laki adalah sebesar 87,9 persen. Sementara TPAK penduduk perempuan hanya sebesar 58,5 persen. Kondisi ini disebabkan penduduk perempuan masih dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya.

Kabupaten Balangan adalah Kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi di Kalimantan Selatan, sebesar 77,5 persen. Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru serta Barito Kuala memiliki TPAK sama besar setelah Kabupaten Balangan yaitu sebesar 76,3 persen. Kota Banjarbaru merupakan kabupaten/kota yang memiliki TPAK paling rendah yaitu 67,1 persen. Rendahnya angka TPAK di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin dikarenakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih bersekolah relatif lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

TPAK Agustus 2011 mengalami kenaikan dibandingkan TPAK Agustus 2010 yang sebesar 71,3 persen. Penurunan TPAK terbesar terjadi di Kabupaten Banjar yang mencapai 1,7 persen. Penurunan ini dipengaruhi penurunan TPAK penduduk perempuan di kabupaten tersebut. Penurunan TPAK perempuan di Kabupaten Banjar sebesar 3,7 persen dibandingkan kondisi Agustus 2010. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tabalong, dimana penurunan TPAK perempuannya mencapai 2,7 persen. Fluktuasi TPAK perempuan merupakan hal yang umum terjadi untuk negara-negara berkembang. Kondisi ini disebabkan jenis pekerjaan, keberlangsungan suatu pekerjaan serta masih adanya anggapan bahwa perempuan hanya merupakan tenaga kerja tambahan di suatu rumah tangga.

Gambar 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten kota Agustus 2011



4.3. Penduduk Bekerja

4.3.1. Jenis Kelamin

Penduduk bekerja pada umumnya lebih didominasi oleh penduduk laki-laki. Sekitar 60,9 persen dari jumlah penduduk bekerja di Kalimantan Selatan adalah penduduk laki-laki. Persentase ini hampir dua kali lebih banyak dibandingkan persentase penduduk perempuan bekerja yang sebesar 39,1 persen. Persentase penduduk laki-laki bekerja mengalami penurunan sebesar 0,7 persen dibandingkan keadaan Agustus 2010 yang sebesar 61,6 persen.

Perbedaan terbesar antara persentase penduduk laki-laki bekerja dengan perempuan bekerja adalah Kota Banjarbaru yaitu sebesar 30,4 persen.

Kabupaten/kota yang memiliki perbedaan besar lainnya adalah Kota Banjarmasin (27,8 persen) dan Kabupaten Tanah Bumbu (26,8 persen).

Tabel 4.4
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
 dan Jenis Kelamin Agustus 2010 - Agustus 2011

Kabupaten / Kota	Agustus 2010		Agustus 2011	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	63,8	36,2	60,8	39,2
Kotabaru	70,0	30,0	61,9	38,1
Banjar	58,8	41,2	60,2	39,8
Barito Kuala	60,7	39,3	59,0	41,0
Tapin	61,8	38,2	59,1	40,9
HSS	57,6	42,4	58,6	41,4
HST	57,0	43,0	58,3	41,7
HSU	54,7	45,3	57,6	42,4
Tabalong	58,6	41,4	60,0	40,0
Tanah Bumbu	72,2	27,8	63,4	36,6
Balangan	56,6	43,4	58,6	41,4
Banjarmasin	61,9	38,1	63,9	36,1
Banjarbaru	66,1	33,9	65,2	34,8
Kalimantan Selatan	61,6	38,4	60,9	39,1

4.3.2. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah ukuran yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang telah bekerja atau terlibat dalam aktifitas perekonomian. TKK penduduk usia kerja pada Agustus 2011 adalah sebesar 94,8 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk

angkatan kerja di Kalimantan Selatan terdapat 94 orang telah bekerja atau terserap pasar kerja yang tersebar diberbagai sektor perekonomian pada kondisi Agustus 2011. TKK penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing 95,7 persen dan 93,4 persen. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada.

Tabel 4.5
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin Agustus 2010-2011

Kabupaten / Kota	Agustus 2010			Agustus 2011		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Laut	96,6	95,4	96,1	94,8	93,3	94,2
Kotabaru	96,6	92,1	95,2	96,1	94,5	95,5
Banjarnegara	98,0	93,9	96,3	96,8	93,2	95,3
Barito Kuala	96,2	95,0	95,7	96,2	93,6	95,1
Tapin	95,0	92,1	93,9	94,3	95,9	95,0
HSS	96,0	95,5	95,8	94,8	97,0	95,7
HST	92,5	95,4	93,7	94,4	96,9	95,4
HSU	97,4	96,2	96,9	93,0	97,1	94,7
Tabalong	96,8	96,0	96,5	94,8	96,1	95,3
Tanah Bumbu	96,1	80,7	91,2	96,9	92,5	95,3
Balangan	98,8	96,0	97,6	96,4	99,5	97,7
Banjarmasin	93,2	91,8	92,7	96,2	87,5	92,9
Banjarnegara	94,3	87,5	91,9	96,4	88,1	93,3
Kalimantan Selatan	95,8	93,1	94,7	95,7	93,4	94,8

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Kalimantan Selatan kondisi Agustus 2011 adalah sebesar 94,8 persen. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen dibandingkan keadaan Agustus 2010 yang sebesar 94,7

persen. Kenaikan TKK Agustus 2011 disebabkan kenaikan TKK disebagian kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kabupaten/kota yang mengalami kenaikan TKK yang relatif tinggi adalah Kabupaten Tanah Bumbu (4,1 persen), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (1,7 persen) dan Kota Banjarbaru (1,4 persen).

TKK menurut jenis kelamin sebagian mengalami kenaikan dibandingkan periode setahun yang lalu. Kenaikan TKK penduduk perempuan memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan TKK di Provinsi Kalimantan Selatan pada Agustus 2011. Selama periode tersebut kenaikan TKK penduduk perempuan adalah sebesar 0,3 persen. Kenaikan TKK penduduk perempuan jauh di atas TKK penduduk laki-laki yang mengalami penurunan sebesar 0,1 persen.

Menurut kabupaten/kota kenaikan TKK penduduk laki-laki terjadi pada kabupaten/kota yang menjadi tujuan migrasi penduduk. Kabupaten/kota yang merupakan pusat perdagangan di Kalimantan Selatan seperti Banjarmasin mengalami kenaikan TKK penduduk laki-laki terbesar yaitu 3,0 persen dan Kota Banjarbaru mengalami kenaikan TKK penduduk laki-laki sebesar 2,1 persen. Kenaikan ini lebih disebabkan dampak rencana pemindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

4.3.3. Tingkat Pendidikan

Keharusan untuk meningkatkan level pendidikan penduduk bekerja di Kalimantan Selatan seharusnya menjadi salah satu prioritas pembangunan. Sekitar 72,9 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Selatan memiliki ijazah tertinggi di bawah jenjang pendidikan SLTA. Bahkan lebih dari

setengah jumlah penduduk yang bekerja hanya berijazah Sekolah Dasar dan mereka yang tidak pernah menikmati pendidikan formal.

Tabel 4.6
Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2011

Kabupaten/ Kota	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				Jumlah
	Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA Ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	29,72	26,18	18,19	25,90	100,00
Kotabaru	19,74	39,32	15,43	25,51	100,00
Banjar	25,76	31,68	18,97	23,59	100,00
Barito Kuala	30,03	27,57	18,75	23,65	100,00
Tapin	24,77	40,37	18,18	16,69	100,00
Hulu Sungai Selatan	35,15	34,74	13,35	16,77	100,00
Hulu Sungai Tengah	26,65	39,49	14,50	19,36	100,00
Hulu Sungai Utara	17,98	38,41	19,32	24,29	100,00
Tabalong	17,46	27,12	23,61	31,80	100,00
Tanah Bumbu	28,44	27,85	20,54	23,17	100,00
Balangan	25,08	34,99	16,14	23,79	100,00
Banjarmasin	15,46	20,19	25,50	38,86	100,00
Banjarbaru	13,04	17,75	20,06	49,15	100,00
Kalimantan Selatan	23,47	30,08	19,33	27,12	100,00

Kondisi tingkat pendidikan penduduk bekerja di Kalimantan Selatan cukup memprihatinkan. Ketatnya persaingan pasar kerja mengakibatkan tenaga kerja penduduk yang telah lama menetap di Kalimantan Selatan akan sulit bersaing dengan tenaga kerja dari luar Kalimantan Selatan, khususnya untuk lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi. Kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi

modern adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Penyiapan sumber daya manusia yang unggul perlu direncanakan untuk masa mendatang. Bagi para tenaga kerja yang telah terlanjur masuk ke dunia kerja, khususnya usia muda perlu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui pelatihan teknis.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut dan Barito Kuala merupakan kabupaten/kota dengan persentase terbesar untuk penduduk bekerja yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal. Pada ketiga Kabupaten tersebut lebih dari sepertiga jumlah penduduk bekerjanya tidak pernah sekolah atau mereka yang putus di sekolah dasar. Kota Banjarmasin dan Banjarbaru memiliki persentase tertinggi kualitas pendidikan untuk penduduk bekerja. Hampir setengah dari jumlah penduduk bekerja di dua wilayah administrasi tersebut berpendidikan SLTA ke atas.

4.3.4. Jumlah Jam Kerja

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat optimalisasi penduduk bekerja adalah dengan melihat jumlah jam kerja. Jumlah penduduk bekerja kondisi Agustus 2011 dengan jam kerja lebih dari 35 jam selama seminggu adalah sebesar 56,66 persen. Indikator ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan Agustus 2010 sebesar 59,54 persen. Selebihnya sebesar 43,34 persen adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan mereka yang sementara tidak bekerja saat pendataan dilaksanakan.

Tabel 4.7
 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
 dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Agustus 2011

Kabupaten/ Kota	Jumlah Jam Kerja Seminggu			Jumlah
	Sementara Tidak Bekerja	1-34	35 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	4,60	34,74	60,66	100,00
Kotabaru	4,09	35,77	60,14	100,00
Banjar	4,78	34,85	60,37	100,00
Barito Kuala	4,16	42,10	53,73	100,00
Tapin	8,12	49,82	42,06	100,00
HSS	5,82	43,12	51,06	100,00
HST	8,37	57,94	33,69	100,00
HSU	5,40	43,84	50,76	100,00
Tabalong	4,00	54,41	41,60	100,00
Tanah Bumbu	6,27	30,39	63,34	100,00
Balangan	4,89	67,05	28,06	100,00
Banjarmasin	3,51	21,99	74,50	100,00
Banjarbaru	4,13	26,74	69,13	100,00
Kalimantan Selatan	5,00	38,34	56,66	100,00

Terdapat 7 kabupaten yang memiliki persentase penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam seminggu di bawah angka rata-rata provinsi. Ketujuh kabupaten tersebut Kabupaten Barito Kuala dan 6 kabupaten yang termasuk dalam wilayah banua enam. Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru merupakan wilayah dengan persentase terbesar penduduk bekerja 35 jam keatas, yaitu sebesar 74,50 persen dan 69,13 persen.

Besaran persentase penduduk bekerja kurang dari 35 jam seminggu menjadi salah satu indikator yang menunjukkan belum optimalnya efisiensi tenaga kerja di wilayah tersebut. Kabupaten Balangan merupakan wilayah yang memiliki persentase terbesar untuk penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dan mereka yang sementara tidak bekerja, yaitu sebesar 71,94 persen. Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kabupaten lainnya yang lebih dari setengah penduduk bekerjanya memiliki jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu.

Hubungan antara tingkat pendidikan pekerja dan jumlah jam kerja memiliki kecenderungan searah. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin berpeluang untuk memiliki jam kerja yang lebih lama dibandingkan orang lain dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa persentase tertinggi untuk penduduk bekerja di atas 35 jam adalah pada jenjang pendidikan SLTA ke atas yaitu sebesar 63,58 persen. Jumlah persentase ini semakin berkurang pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Persentase penduduk bekerja yang berijazah SLTP dengan jam kerja 35 jam atau lebih adalah sebesar 61,42 persen dan yang berijazah SD kebawah sebesar 51,43 persen.

Hal sebaliknya pada terjadi pada kelompok penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu. Semakin rendah ijazah yang dimiliki maka persentase penduduk yang bekerja pada kelompok jam kerja di bawah 35 jam semakin banyak. Sebanyak 27,79 persen dari penduduk bekerja yang berijazah SLTA ke atas memiliki jam kerja 1-34 jam selama seminggu. Persentase ini

bertambah pada penduduk bekerja yang berijazah SLTP dan SD ke bawah, yaitu 35,24 persen dan 44,80 persen.

Tabel 4.8
 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Agustus 2011

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Jam Kerja Seminggu			Jumlah
	Sementara Tidak Bekerja	1 - 34	35 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD / Tamat SD	3,77	44,80	51,43	100,00
SLTP	3,34	35,24	61,42	100,00
SLTA ke Atas	8,64	27,79	63,58	100,00
Jumlah	5,00	38,34	56,66	100,00

4.3.5. Lapangan Usaha

Lapangan usaha dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertanian, industri dan jasa. Kelompok pertanian terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Kelompok industri terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air serta sektor bangunan/konstruksi. Sedangkan kelompok jasa terdiri dari sektor perdagangan besar/eceran, rumah makan/restoran dan hotel, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi dan jasa perusahaan serta sektor jasa kemasyarakatan dan lainnya.

Tabel 4.9
 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
 dan Kelompok Sektor Agustus 2011

Kabupaten/ Kota	Pertanian	Industri	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	47,11	16,32	36,58	100,00
Kotabaru	43,82	17,27	38,91	100,00
Banjar	56,16	9,28	34,56	100,00
Barito Kuala	64,97	9,76	25,26	100,00
Tapin	63,01	14,33	22,67	100,00
HSS	37,70	16,00	46,30	100,00
HST	58,45	12,35	29,20	100,00
HSU	32,82	26,29	40,88	100,00
Tabalong	58,11	16,77	25,12	100,00
Tanah Bumbu	37,04	15,48	47,48	100,00
Balangan	73,64	4,93	21,43	100,00
Banjarmasin	2,13	19,95	77,92	100,00
Banjarbaru	8,05	30,27	61,67	100,00
Kalimantan Selatan	41,45	15,93	42,62	100,00

Penduduk Kalimantan Selatan sebagian besar masih bekerja di kelompok pertanian. Kelompok pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 41,45 persen. Kelompok dengan kontribusi terbanyak dalam penyerapan tenaga kerja adalah kelompok jasa. Terdapat sebanyak 42,62 persen penduduk bekerja di kelompok jasa. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki posisi yang strategis karena menjadi poros antar provinsi di regional

Kalimantan dan sebagai pintu masuk arus barang dan jasa antara provinsi-provinsi di pulau Kalimantan dengan pulau lain di Indonesia.

Ketergantungan penduduk Kalimantan Selatan terhadap dua kelompok ini terlihat sangat besar. Kelompok pertanian dan jasa mampu menyediakan lapangan kerja sebesar 84,07 persen. Sedangkan kelompok industri hanya mampu menampung 15,93 persen dari jumlah penduduk bekerja. Sumber daya alam yang melimpah masih belum mampu menstimulus berkembangnya perekonomian di kelompok sektor sekunder, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap besarnya tenaga kerja yang terserap dalam kelompok sektor tersebut.

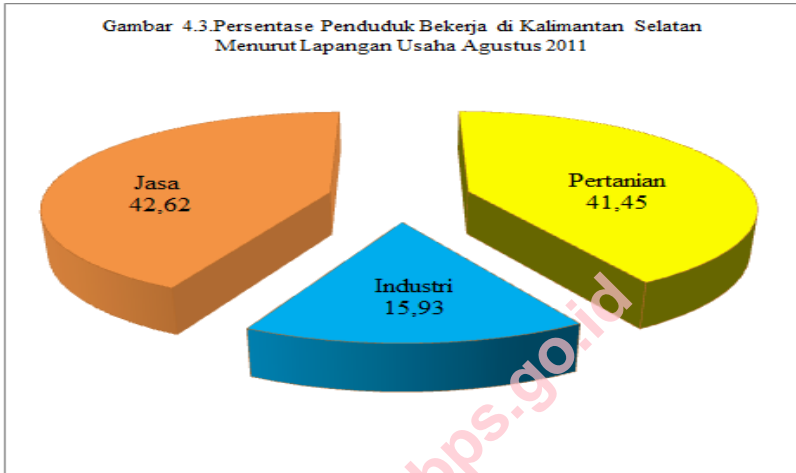
Persentase penduduk yang bekerja di kelompok pertanian terbesar terjadi di daerah Kabupaten Balangan, yaitu sebesar 73,64 persen. Kabupaten Barito Kuala adalah kabupaten lainnya yang memiliki persentase penduduk bekerja di kelompok pertanian relatif lebih besar yaitu 64,97 persen. Penduduk Kota Banjarmasin dan Banjarbaru sebagian besar bekerja di kelompok jasa. Semakin berkurangnya lahan pertanian dan sebagai pusat ibukota provinsi menyebabkan sekitar 77,92 persen penduduk Kota Banjarmasin bekerja pada sektor jasa. Demikian juga dengan Kota Banjarbaru, sebesar 61,67 persen penduduk bekerja di Kota Banjarbaru adalah terserap di kelompok jasa.

Tabel 4.10
 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin
 dan Kelompok Sektor Agustus 2011

Jenis Kelamin	Pertanian	Industri	Jasa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	39,82	21,35	38,83	100,00
Perempuan	43,98	7,50	48,52	100,00
Laki-laki + Perempuan	41,45	15,93	42,62	100,00

Komposisi penduduk bekerja menurut sektor dan jenis kelamin pada sektor pertanian tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Sekitar 39,82 persen penduduk laki-laki bekerja di sektor pertanian. Persentase ini tidak jauh berbeda dengan persentase penduduk perempuan bekerja di sektor pertanian yang sebesar 43,98 persen. Kondisi ini disebabkan sektor pertanian di Kalimantan Selatan masih dilakukan secara tradisional serta belum menggunakan teknologi yang menuntut penguasaan teknologi.

Perbedaan jenis kelamin penduduk yang bekerja menjadi nampak terlihat pada sektor industri. Persentase penduduk laki-laki yang bekerja di sektor ini hampir tiga kali lipat dari persentase jumlah penduduk perempuan. Kondisi ini disebabkan penguasaan teknologi, tingkat pendidikan dan serta fisik lebih didominasi oleh penduduk laki-laki. Sekitar 21,35 persen penduduk laki-laki bekerja di sektor industri. Angka ini jauh di atas angka persentase penduduk perempuan yang bekerja di sektor jasa sebesar 7,50 persen.



4.3.6. Status Pekerjaan

Salah satu ciri pada ketenagakerjaan di negara sedang berkembang adalah kuatnya dominasi sektor pertanian dan sektor informal. Maka indikator ketenagakerjaan yang perlu menjadi perhatian adalah status seseorang dalam pekerjaan. Hal mendasar keterlibatan seseorang dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai pengusaha (berusaha) atau sebagai pekerja (buruh). Secara umum BPS menggolongkan status pekerjaan menjadi seseorang berdasarkan status pekerjaan (Gambar 2.2).

Hasil Sakernas Agustus 2011 menunjukkan bahwa sekitar 19,77 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Selatan memiliki status berusaha sendiri. Persentase ini tidak jauh berbeda dengan penduduk bekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yang sebesar 19,68 persen. Hal yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya jumlah penduduk bekerja dengan status adalah pekerja tidak dibayar/pekerja

keluarga. Hampir seperlima dari jumlah penduduk bekerja adalah mereka yang bekerja tetapi hanya membantu untuk mendapatkan penghasilan. Artinya mereka memiliki aktifitas bekerja namun tidak mendapatkan kompensasi (balas jasa) atau memperoleh pendapatan secara langsung atas pekerjaan yang dia lakukan.

Tabel 4.11
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
dan Jenis Kelamin Agustus 2011

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	20,00	19,43	19,77
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap / Buruh Tidak Dibayar	24,77	11,77	19,68
Berusaha Dibantu Buruh Tetap / Buruh Dibayar	4,32	1,51	3,22
Buruh / Karyawan	36,00	23,19	30,99
Pekerja Bebas	7,06	5,05	6,27
Pekerja Tidak Dibayar / Pekerja Keluarga	7,86	39,05	20,07
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan bahwa penduduk perempuan masih menjadi tenaga kerja yang membantu untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk perempuan yang bekerja dengan status pekerja keluarga. Sekitar 39,05 persen dari jumlah penduduk perempuan yang bekerja di Kalimantan Selatan berstatus pekerja tidak

dibayar atau pekerja keluarga. Angka ini jauh dibandingkan persentase jumlah penduduk laki-laki yang bekerja dengan status dalam pekerjaan yang sama, yaitu sekitar 7,86 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang bekerja belum optimal dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai rumah tangganya.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar berakibat meningkatnya kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini terasa lebih memprihatinkan karena rendahnya daya saing tenaga kerja. Besarnya angkatan kerja yang tidak terserap menyebabkan mereka masuk ke dalam sektor informal.

Kegiatan formal dan informal dapat dilihat berdasarkan status pekerjaan. Berdasarkan status pekerjaan, seorang pekerja digolongkan ke dalam sektor formal adalah penduduk yang bekerja sebagai pengusaha dibantu dengan buruh tetap/buruh dibayar dan sebagai buruh/karyawan. Sedangkan pekerja sektor informal adalah pekerja dengan status selain kedua status tersebut.

Tabel 4.12
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Formal/Informal dan Jenis Kelamin Agustus 2011

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Formal	40,32	24,70	34,21
Informal	59,68	75,30	65,79
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sektor informal menjadi sektor yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 65,79 persen. Sementara sektor formal hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 34,21 persen. Menurut jenis kelamin memperlihatkan bahwa penduduk perempuan yang bekerja di sektor informal lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Hanya sekitar 24,70 persen penduduk perempuan yang bekerja di sektor formal.

4.4. Pengangguran

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan aspek pokok dalam pembahasan kesejahteraan penduduk. Kesempatan kerja menjadi bagian mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berdimensi sosial dan ekonomi. Diharapkan setiap penduduk yang mampu dan mau bekerja akan memperoleh pekerjaan yang sesuai disertai dengan perlindungan kerja yang manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh balas jasa faktor produksi yang mencukupi kehidupan layak.

Aspek ketenagakerjaan tidak terlepas dari permasalahan pengangguran. Pengangguran ditinjau dari sisi ekonomi adalah keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang dalam memberikan peranan yang nyata untuk menunjukkan kualitasnya sebagai sumber daya manusia. Secara harfiah, pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pengangguran dibatasi kepada penduduk yang memiliki keinginan secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sehingga dapat dibedakan orang yang tidak bekerja dan tidak termasuk klasifikasi pengangguran yang disebabkan kegiatan bersekolah atau mengurus rumah tangga atau mereka yang malas.

Pengangguran terbuka diklasifikasikan sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau penduduk yang tidak bekerja karena sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan dengan alasan putus asa serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. (Gambar 2.1). Perbandingan jumlah penduduk yang termasuk pengangguran terhadap jumlah penduduk angkatan kerja disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 4.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Agustus 2011

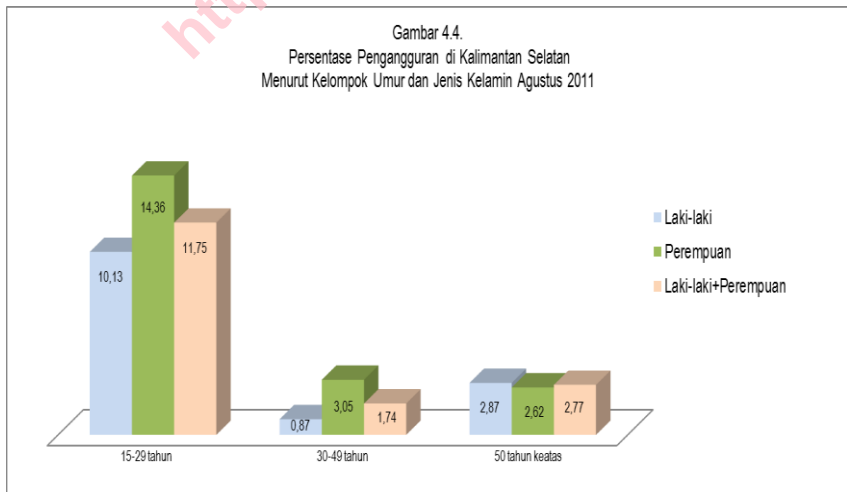
Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
15 – 29	10,13	14,36	11,75
30 – 49	0,87	3,05	1,74
≥ 50	2,87	2,62	2,77
Jumlah	4,34	6,59	5,23

Pada bulan Agustus 2011, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan sebesar 5,23 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2010 yang sebesar 5,25 persen. TPT tertinggi terjadi pada kelompok umur 15-29 tahun. Pada kelompok usia muda ini TPT mencapai 11,75 persen. Kondisi ini merefleksikan bahwa sisi ekonomi sangat mempengaruhi sisi kehidupan lainnya. Permasalahan pengangguran pada usia muda juga

menggambarkan permasalahan kemampuan biaya dan kemampuan untuk mengakses fasilitas pendidikan.

Seiring bertambahnya usia permasalahan pengangguran terbuka mengalami penurunan. Hal ini lebih disebabkan pada usia dewasa tersebut penduduk telah memasuki jenjang perkawinan. Tanggung jawab secara ekonomi dalam rumah tangga menuntut seseorang untuk melakukan pekerjaan apapun yang dapat dilakukan. Kondisi ini mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi pengangguran terbuka.

TPT penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Pada Kondisi Agustus 2011, TPT penduduk perempuan mencapai 6,59 persen. Faktor penanggung jawab dalam rumah tangga memaksa untuk penduduk laki-laki tidak menjadi penganggur. Kondisi ini semakin diperkuat melihat pengangguran menurut kelompok usia dan jenis kelamin. TPT penduduk laki-laki berusia 30-49 tahun hanya sebesar 0,87 persen.



Tabel 4.14.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin Agustus 2011

Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	5,21	6,67	5,79
Kotabaru	3,89	5,48	4,50
Banjar	3,23	6,78	4,67
Barito Kuala	3,78	6,41	4,88
Tapin	5,67	4,13	5,04
HSS	5,21	3,02	4,32
HST	5,63	3,14	4,61
HSU	6,97	2,88	5,28
Tabalong	5,22	3,90	4,70
Tanah Bumbu	3,06	7,53	4,75
Balangan	3,55	0,53	2,32
Banjarmasin	3,82	12,47	7,14
Banjarbaru	3,61	11,94	6,69
Kalimantan Selatan	4,34	6,59	5,23

Kota Banjarmasin dan Banjarbaru serta kabupaten Tanah Laut adalah kabupaten/kota yang memiliki TPT tertinggi di Kalimantan Selatan. TPT Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru pada Agustus 2011 melebihi angka 6 persen. TPT Kabupaten Tanah Laut memiliki TPT tertinggi berikutnya dengan angka 5,79 persen. Tingginya angka TPT pada kabupaten/kota tersebut merupakan salah satu ciri yang melekat pada wilayah tujuan migrasi. TPT terendah terjadi di Kabupaten Balangan yang sebesar 2,32 persen.

Sebagian kabupaten/kota di Kalimantan Selatan memperlihatkan TPT untuk penduduk laki-laki selalu lebih rendah dibandingkan TPT penduduk perempuan. Perbedaan terbesar antara TPT laki-laki dan penduduk perempuan terjadi di Kota Banjarmasin. Kondisi ini disebabkan sebagian besar migran pendatang untuk penduduk laki-laki tertampung di sektor Jasa dan Perdagangan.

Permasalahan ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan bukan hanya pada masih rendahnya kualitas pekerja. Permasalahan lain yang dihadapi adalah meningkatnya tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang memiliki pendidikan tinggi, yaitu mereka yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan atas, diploma dan yang menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana. Pada Agustus 2011 tercatat sekitar 39,90 persen dari jumlah penganggur di Kalimantan Selatan. Kondisi ini memiliki potensi yang hilang (*potential loss*) bagi produktivitas Kalimantan Selatan. Menghitung besaran potensi yang hilang tersebut menggunakan pendekatan jumlah upah minimum provinsi yang mungkin diterima selama setahun oleh para penganggur tersebut seandainya penganggur yang berijazah akademik tersebut memiliki pekerjaan.

Atas dasar tersebut, pemerintah perlu bekerja keras meraih kembali potensi yang hilang demi meningkatkan produktivitas regional Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Mengembalikan potensi yang hilang bukanlah persoalan mudah di tengah kesempatan kerja yang makin terbatas. Untuk itu diperlukan upaya penciptaan kerja secara mandiri. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional bahwa perlu dilakukan perbaikan kurikulum melalui pelajaran

kewirausahaan. Namun, perubahan kurikulum pendidikan tinggi bukanlah hal baru. Mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djonegoro pernah mengingatkan pentingnya mengubah paradigma pendidikan dari orientasi jumlah (*supply minded*) ke permintaan pasar kerja (*demand minded*).

Tabel 4.15.
Persentase Jumlah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2011

Kabupaten/ Kota	SD kebawah ^{*)}	SLTP	SLTA dan Universitas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	38,06	17,91	44,03	100,00
Kotabaru	36,53	39,34	24,13	100,00
Banjar	37,60	19,70	42,70	100,00
Barito Kuala	14,92	30,11	54,96	100,00
Tapin	44,06	23,98	31,96	100,00
HSS	65,51	13,50	20,98	100,00
HST	54,34	22,17	23,50	100,00
HSU	55,15	17,27	27,58	100,00
Tabalong	35,42	36,20	28,38	100,00
Tanah Bumbu	48,99	20,06	30,95	100,00
Balangan	10,56	78,95	10,49	100,00
Banjarmasin	14,55	33,03	52,43	100,00
Banjarbaru	17,19	25,38	57,43	100,00
Kalimantan Selatan	33,48	26,62	39,90	100,00

Catatan : *) Termasuk mereka yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kalsel.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. KS Tubun No. 117 Banjarmasin 70241
Telp : (0511) 3262314 / Fax (0511) 3261585
E-mail : bps6300@bps.go.id